



2025
RANCANGAN
AKHIR
RENCANA
KERJA



DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tentunya visi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan tidak terlepas dari visi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026 yaitu **“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”**. Dalam mendukung terwujudnya visi maka perlu didukung dengan adanya misi agar dapat tercapai tujuan dari visi tersebut. Misi yang berkaitan dengan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan masuk kedalam Misi 1,2 dan 3 yaitu **“Misi 1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah, Misi 2 Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata dan Misi 3, Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”**

Guna mendukung tercapainya visi dan misi tersebut maka disusunlah Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan. Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat terencana dan terlaksana dengan baik sebagai upaya dalam tercapainya visi dan misi diatas.

Demikian dokumen Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun 2025 ini disampaikan, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan perikanan, pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas.



Tarempa, 22 Juli 2024

Kepala Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan,

Rovaniyadi, S.P

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19710726 200212 1 005

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (2023) | 6 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD | 6 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... | 34 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD | 37 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 42 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 53 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 54 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 54 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD | 54 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 56 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 63 |
| 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | 63 |
| BAB IV PENUTUP | 79 |

DAFTAR TABEL

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2023..... | 6 |
| Tabel 2. Realisasi Fisik Dan Keuangan Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023..... | 16 |
| Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023..... | 22 |
| Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas | 35 |
| Tabel 5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas | 43 |
| Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025..... | 53 |
| Tabel 7. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... | 63 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja DPPP Tahun 2025. 80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan terukur.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2025 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan Rancangan Akhir Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
2. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi

pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan; sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.

3. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
5. Program kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya. Sedangkan untuk RKPD kabupaten/kota dirinci menurut sumber dana APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan perikanan, pertanian dan pangan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Penyelenggaraan program perikanan, pertanian dan pangan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang perikanan, pertanian dan pangan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi perikanan, pertanian dan pangan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu, penyusunan Renja Dinas Perikanan Pertanian dan

Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berpedoman pada hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
 14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
 15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.
 16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk satu tahun mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dan hasil musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas serta indikator kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN OPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (2023)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023. Untuk Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2022 terdapat 10 Program dan 19 Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.34.309.271.378 (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Adapun Realisasi Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp.26.630.629.327 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 77,62% dan realisasi fisik mencapai 84,83%. Untuk Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dapat dilihat pada Tabel 2.

Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1:

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2023

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian 2023 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| A | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan | Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Nelayan | 101,5 109 | 101,5 109* | 100% |
| 1 | Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan | Persentase cakupan bina kelompok petani | 25% | 49 Kel/ 76,56% | >100 |
| 2 | | Persentase cakupan bina kelompok nelayan | 25% | 40 Kel/13,6 % | <100 |
| B | Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB | 28,23 71,9 | 28,23 71,9* | 100% |
| 3 | Meningkatnya produksi perikanan | Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya) | 3% | 24.178,4 ton/14,96 % | >100 |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|
| 4 | Meningkatnya produksi pertanian | Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan | 2% | 494,88 ton/1,2% | <100 |
| 5 | | Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas) | 2,5% | 70,535 ton/1,92 % | <100 |
| 6 | Meningkatnya produksi olahan perikanan | Persentase peningkatan produksi olahan perikanan | 15% | 531,4 ton/ 9,3% | <100 |
| 7 | Meningkatnya ketahanan pangan | Score Pola Pangan Harapan | 81 | 78,7 | <100 |
| C | Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel | Nilai RB Perangkat Daerah | CC/57,2 | NA* | 100% |
| 8 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | B/70 | 77,41 | >100 |
| 9 | | Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah | 94,8 | 95,8 | >100 |

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase cakupan bina kelompok petani. Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap target capaian Renstra yaitu, Penyuluhan kepada kelembagaan petani dilaksanakan secara berkala, sehingga dapat diketahui kendala yang dihadapi petani. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah Peningkatan pembinaan terhadap kelompok tani, pemberian bantuan yang dapat melatih petani untuk jadi lebih mandiri
2. Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase cakupan bina kelompok nelayan. Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap target capaian Renstra yaitu, Pembinaan terhadap kelompok perikanan tangkap masih kurang dikarenakan banyaknya jumlah kelompok perikanan tangkap. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah

Dibutuhkan pembaharuan terhadap database jumlah kelompok perikanan tangkap yang masih aktif.

3. Meningkatnya produksi perikanan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya). Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap target capaian Renstra yaitu, Peningkatan produksi perikanan mengalami peningkatan sesuai dengan program pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah Peningkatan produksi harus diimbangi dengan pendataan yang akurat, agar potensi perikanan dapat berkelanjutan.
4. Meningkatnya produksi pertanian dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap target capaian Renstra yaitu, Peningkatan produksi pertanian (padi dan cengkeh) mengalami penurunan. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah Dibutuhkan peningkatan terhadap sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan.
5. Meningkatnya produksi pertanian dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas). Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap target capaian Renstra yaitu, produksi peternakan (sapi dan unggas) mengalami penurunan yang tidak signifikan dari tahun sebelumnya. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah Pelatihan terhadap tenaga penyuluh peternakan dapat dilaksanakan karena masih kurangnya tenaga medik veteriner.
6. Meningkatnya produksi olahan perikanan dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase peningkatan produksi olahan perikanan. Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap target capaian Renstra yaitu, Penurunan produksi olahan perikanan cukup signifikan dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana olahan produk perikanan. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah Upaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan pengolahan perikanan secara berkelompok agar dapat dibantu sarana dan prasarannya melalui APBN.
7. Meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator kinerja utama yaitu Score Pola Pangan Harapan. Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap target capaian

Renstra yaitu, Masih terdapat konsumsi kelompok pangan yang belum mencapai skor ideal. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah Diperlukan peningkatan kapasitas tenaga analis ketahanan pangan.

8. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja utama yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap target capaian Renstra yaitu, Terdapat peningkatan nilai SAKIP yang signifikan karena pemenuhan dokumen SAKIP dan IKM. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah Diperlukan peningkatan kapasitas seluruh ASN di DPPP terkait dengan SAKIP dan IKM.
9. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja utama yaitu Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah. Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap target capaian Renstra yaitu, Terdapat peningkatan nilai SAKIP yang signifikan karena pemenuhan dokumen SAKIP dan IKM. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah Diperlukan peningkatan kapasitas seluruh ASN di DPPP terkait dengan SAKIP dan IKM.

Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini dengan total sebesar Rp.8.929.393.106 dan realisasi mencapai Rp.7.582.690.640 atau sebesar 84,92%. Dari realisasi keuangan tersebut digunakan untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara selama 14 bulan (termasuk gaji ke-13 dan 14) dan tunjangan daerah selama 12 bulan. Selain itu, pada kegiatan ini juga terdapat sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD realisasi keuangan 84,79%. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 90,43% yaitu telah memenuhi target kinerja yang direncanakan dan tidak ada kendala yang berarti.

2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.178.215.600 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.141.305.300 atau sebesar 79,29% dan realisasi fisik mencapai 83,33%. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari ini juga dilakukan untuk meningkatkan konsumsi pangan sejalan dengan upaya untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan (Score Pola Pangan Harapan). Komoditas sayur dan buah Kelompok sayur dan buah sangat penting peranannya dalam pencapaian kualitas sumber daya manusia. Masih rendahnya konsumsi sayur dan buah tersebut lebih disebabkan karena factor kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber vitamin dan mineral serta serat masih kurang. Disisi lain, biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah sesuai njuran ternyata tidaklah murah. Konsumsi sayur dan buah masyarakat berkaitan erat juga dengan distribusi sayur dan buah antara wilayah sentra produksi dan di luar sentra produksi yang berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut. Untuk itu, dibutuhkan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah. Badan Ketahanan Pangan sudah melaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dan Urban Farming untuk meningkatkan aksesibilitas dan konsumsi sayur dan buah. Namun demikian, masih dibutuhkan upaya edukasi kepada masyarakat akan pentingnya konsumsi sayur dan buah yang melibatkan dukungan dari berbagai lintas sektor.

Pada Kegiatan ini dilakukan juga Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Kegiatan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DP3) Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.141.748.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.3.663.945 atau sebesar 2,58% dan realisasi fisik mencapai 2,89%.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dilakukannya pengelolaan keseimbangan Cadangan Pangan dengan melakukan koordinasi dan pemantauan cadangan pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di gudang Bulog Cabang Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Koordinasi dilakukan dengan melakukan monitoring gudang penyimpan beras CPPD, mendata stok saat ini dan melihat langsung

proses perawatan dan pengelolaan beras CPPD di gudang Bulog. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri atas pengadaan beras untuk cadangan pangan, hal ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kemampuan keuangan daerah.

4. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.1.684.792.252 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.1.377.406.531 atau sebesar 81,76% dan realisasi fisik mencapai 88,01% (memenuhi target kinerja yang direncanakan). Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah Rp.36.915.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.33.885.000 atau sebesar 91,79% dan realisasi fisik sebesar 97,36%. Sub Kegiatan ini terdiri atas DAK Non Fisik guna mendukung operasional penyuluh pertanian.

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.283.709.700 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.125.539.386 atau sebesar 44,25% dan realisasi fisik sebesar 83,33%. Sub Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan mengikuti kegiatan Pekan Nasional di Padang.

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian

Pagu anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.364.167.552 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.1.217.982.145 atau sebesar 89,28% dan realisasi fisik sebesar 83,33%. Sub Kegiatan terdiri atas DAK Fisik yang ditujukan untuk Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan, dimana terdapat uraian belanja untuk mendukung kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam melakukan program peningkatan pengetahuan petani dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelaksanaan penyuluhan pertanian.

5. Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.1.739.435.615 dengan realisasi keuangan mencapai Rp.1.173.307.992 atau sebesar 67,45% dan realisasi fisik mencapai 86,70%. Kegiatan ini terdiri atas DAK Fisik, output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya petani dengan diberikannya bantuan alat prasarana produksi pertanian berupa Bangunan *Rice Milling Unit*, Mesin *Rice Milling Unit*, *Power Thresher*, *Cultivator* di Kecamatan jemaja Timur.

6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.43.052.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.16.904.800 atau sebesar 39,27 % dan realisasi fisik 86,56 %. Capaian output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis, dokumen penganggaran dan LKJIP (memenuhi target kinerja atau output yang direncanakan).

7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.43.800.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.43.800.000. Capaian output kegiatan ini adalah pembayaran honor kepada pejabat dan staf penatausahaan barang dengan persentase realisasi fisik 100% dan telah memenuhi target yang direncanakan.

8. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.622.516.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.272.651.586 atau sebesar 43,80%. pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. dengan persentase realisasi fisik 77,17 % dan telah memenuhi target yang direncanakan.

9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.724.998.339 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.404.498.100 atau sebesar 55,79% dan realisasi fisik 50,19%. Output yang dari Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah tersedianya biaya sewa gedung kantor dan gudang penyimpanan dengan persentase realisasi fisik 75,33% dan telah memenuhi target yang direncanakan.

10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.4.017.749.997 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.864.388.785 atau sebesar 96,18% dan realisasi fisik sebesar 91,43% (telah memenuhi target yang direncanakan). Output kegiatan ini adalah tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah seperti Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu pembayaran gaji honorer selama 12 bulan.

11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.121.383.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.41.006.750 atau 33,78% dan realisasi fisik pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 47,79% (telah memenuhi target yang direncanakan). Akan tetapi, terdapat kendala pada pembayaran pajak kendaraan, dimana biaya pada kuitansi pajak kendaraan yang tidak sesuai dengan harga yang tercantum di DPA.

12. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.11.737.703.969 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.562.700.810 Capaian Kinerja realisasi fisik 72,95%. Kegiatan ini terdiri atas kegiatan DaK berupa bantuan diserahkan kepada kelompok nelayan berupa *Coolbox*, Mesin Kapal Perikanan, Pengadaan Armada Penangkapan Ikan < 5 GT.

13. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 299.249.738 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 268.442.600 atau 89,71% dan realisasi fisik 94,11%. *Sub Kegiatan* : Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil. Kegiatan ini dengan sasaran adalah kelompok pembudidaya (POKDAKAN) yang dibentuk dan dikembangkan.

14. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 2.681.013.699 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.224.935.318 atau 82,99% dan realisasi fisik 93,54%. Kegiatan ini terdiri atas DAK fisik berupa Pembangunan Kolam atau Bak Pemijah/ Induk/ Calon Induk/ Larva/ Tandon, Pembangunan Saluran Air Pasok Dan/ Buang, serta bantuan kepada pembudidaya ikan yaitu Jaring Keramba, Jongkong, dan benih ikan kerapu untuk pembudidaya ikan.

15. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp.480.746.481 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 343.464.060 atau sebesar 71,44% dan realisasi fisik mencapai 89,25%. Output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya petani dengan adanya bantuan sarana produksi pertanian berupa bahan bibit/benih tanaman dan obat-obatan hewan.

16. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Total pagu anggaran pada sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis ini ialah Rp.344.692.820,- yang bersumber dari APBD. Capaian realisasi keuangan pada sub kegiatan ini ialah Rp.90.470.470,- atau sebesar 26,25%, sedangkan realisasi fisik kegiatan mencapai 27,23%.

17. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bermaksud agar terlaksananya proses Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di

Kabupaten Kepulauan Anambas dengan sasaran kegiatan yaitu pelaku usaha perikanan antara lain POKLAHSAR dan pengumpul ikan dengan hasil akhir berupa meningkatnya sarana dan prasarana dalam industri pengolahan ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Serapan Anggaran pada kegiatan ini dengan nilai total anggaran Rp 305.199.800 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 100.329.092 atau 32,87 % dari pagu anggaran total dan realisasi fisik mencapai 84,39 %.

18. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan yang dana pelaksanaannya bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik). Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner kepada masyarakat khususnya peternak. Jasa medik veteriner yang dimaksud ialah seperti pelayanan kesehatan hewan dan pengobatan ternak oleh dokter hewan sebagai petugas medik veteriner maupun petugas lapangan lainnya dibawah penyeliaan dokter hewan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama kecamatan-kecamatan yang memiliki banyak populasi ternak dan terjangkau oleh petugas, mengingat kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri atas pulau-pulau.

Total Anggaran pada kegiatan ini ialah Rp. 161.087.525,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 118.662.548 atau 73,66% dari pagu anggaran total dan realisasi fisik mencapai 80,33%.

19. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 52.491.637 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 dan realisasi fisik sebesar 0% dikarenakan pengadaan bibit ternak merupakan aspirasi DPRD yang tidak dijalankan.

Tabel 2. Realisasi Fisik Dan Keuangan Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Dpa | Realsiasi | | | Silpa |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | Rp | % | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 178.215.600 | 141.305.300 | 79,29 | 83,33 | 36.910.300 |
| | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi | 178.215.600 | 141.305.300 | 79,29 | 83,33 | 36.910.300 |
| 1 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 178.215.600 | 141.305.300 | 79,29 | 83,33 | 36.910.300 |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 141.748.000 | 3.663.945 | 2,58 | 2,89 | 138.084.055 |
| | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 141.748.000 | 3.663.945 | 2,58 | 2,89 | 138.084.055 |
| 2 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 141.748.000 | 3.663.945 | 2,58 | 2,89 | 138.084.055 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 14.502.894.242 | 12.225.940.661 | 84,30 | 77,65 | 2.276.953.581 |
| | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 43.052.900 | 16.904.800 | 39,27 | 86,56 | 26.148.100 |
| 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17.752.900 | 13.400.000 | 75,48 | 89,79 | 4.352.900 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.300.000 | 3.504.800 | 13,85 | 83,33 | 21.795.200 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 622.516.400 | 272.651.586 | 43,80 | 77,17 | 349.864.814 |
| 5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | 6.479.000 | 0 | 0,00 | 85,53 | 6.479.000 |
| 6 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 28.093.100 | 9.635.000 | 34,30 | 91,02 | 18.458.100 |
| 7 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 53.448.400 | 16.307.500 | 30,51 | 30,33 | 37.140.900 |
| 8 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan. | 56.551.500 | 23.997.000 | 42,43 | 85,53 | 32.554.500 |
| 9 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 18.692.400 | 4.422.800 | 23,66 | 83,08 | 14.269.600 |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | 459.252.000 | 218.289.286 | 47,53 | 87,53 | 240.962.714 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 8.929.393.106 | 7.582.690.640 | 84,92 | 90,43 | 1.346.702.466 |
| 11 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | 8.582.593.106 | 7.288.650.640 | 89,20 | 89,20 | 1.293.942.466 |
| 12 | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian(Verifikasi) Keuangan Skpd | 346.800.000 | 294.040.000 | 84,79 | 91,67 | 52.760.000 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | 43.800.000 | 43.800.000 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 13 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd | 43.800.000 | 43.800.000 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 724.998.339 | 404.498.100 | 55,79 | 50,19 | 320.500.239 |
| 14 | Pengadaan Mabel | 13.410.701 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.410.701 |
| 15 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | 60.811.041 | 26.800.000 | 44,07 | 75,25 | 34.011.041 |
| 16 | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | 650.776.597 | 377.698.100 | 58,04 | 75,33 | 273.078.497 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 4.017.749.997 | 3.864.388.785 | 96,18 | 91,43 | 153.361.212 |
| 17 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 138.772.521 | 65.738.800 | 47,37 | 84,46 | 73.033.721 |
| 18 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 63.697.500 | 29.490.000 | 46,30 | 90,46 | 34.207.500 |
| 19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.815.279.976 | 3.769.159.985 | 98,79 | 99,38 | 46.119.991 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 121.383.500 | 41.006.750 | 33,78 | 47,79 | 80.376.750 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 20 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 58.563.500 | 32.300.750 | 55,16 | 80,33 | 26.262.750 |
| 21 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | 62.820.000 | 8.706.000 | 13,86 | 15,25 | 54.114.000 |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | | 11.737.703.969 | 8.562.700.810 | 72,95 | 94,86 | 3.175.003.159 |
| Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 11.737.703.969 | 8.562.700.810 | 72,95 | 94,86 | 3.175.003.159 |
| 22 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil. | 6.151.589.427 | 5.929.077.709 | 96,38 | 99,46 | 222.511.718 |
| 23 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 5.586.114.542 | 2.633.623.101 | 47,15 | 90,26 | 2.952.491.441 |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | | 2.980.263.437 | 2.493.377.918 | 83,66 | 93,82 | 486.885.519 |
| Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | 299.249.738 | 268.442.600 | 89,71 | 94,11 | 30.807.138 |
| 24 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 299.249.738 | 268.442.600 | 89,71 | 94,11 | 30.807.138 |
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | 2.681.013.699 | 2.224.935.318 | 82,99 | 93,54 | 456.078.381 |
| 25 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota | 993.789.747 | 937.997.084 | 94,39 | 99,86 | 55.792.663 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 26 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.687.223.952 | 1.286.938.234 | 76,28 | 87,22 | 400.285.718 |
| Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | | 305.199.800 | 100.329.092 | 32,87 | 84,39 | 204.870.708 |
| Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 305.199.800 | 100.329.092 | 32,87 | 84,39 | 204.870.708 |
| 27 | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 305.199.800 | 100.329.092 | 32,87 | 84,39 | 204.870.708 |
| Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian | | 533.238.118 | 343.464.060 | 64,41 | 44,63 | 189.774.058 |
| Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | 480.746.481 | 343.464.060 | 71,44 | 89,25 | 137.282.421 |
| 28 | Peningkatan Kualitas Sdg Hewan Atau Tanaman. | 480.746.481 | 343.464.060 | 71,44 | 89,25 | 137.282.421 |
| Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 52.491.637 | 0 | 0,00 | 0,00 | 52.491.637 |
| 29 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota | 52.491.637 | 0 | 0,00 | 0,00 | 52.491.637 |
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | 1.739.435.615 | 1.173.307.992 | 67,45 | 86,70 | 566.127.623 |
| Pembangunan Prasarana Pertanian | | 1.739.435.615 | 1.173.307.992 | 67,45 | 86,70 | 566.127.623 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 30 | Pembangunan, Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 1.739.435.615 | 1.173.307.992 | 67,45 | 86,70 | 566.127.623 |
| Prorgam Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | 505.780.345 | 209.133.018 | 41,35 | 53,78 | 296.647.327 |
| Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 344.692.820 | 90.470.470 | 26,25 | 27,23 | 254.222.350 |
| 31 | Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dan Zoonosis | 344.692.820 | 90.470.470 | 26,25 | 27,23 | 254.222.350 |
| Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 161.087.525 | 118.662.548 | 73,66 | 80,33 | 42.424.977 |
| 32 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 161.087.525 | 118.662.548 | 73,66 | 80,33 | 42.424.977 |
| Program Penyuluhan Pertanian | | 1.684.792.252 | 1.377.406.531 | 81,76 | 88,01 | 307.385.721 |
| Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | 1.684.792.252 | 1.377.406.531 | 81,76 | 88,01 | 307.385.721 |
| 33 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa | 36.915.000 | 33.885.000 | 91,79 | 97,36 | 3.030.000 |
| 34 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa | 283.709.700 | 125.539.386 | 44,25 | 83,33 | 158.170.314 |
| 35 | Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluh Pertanian | 1.364.167.552 | 1.217.982.145 | 89,28 | 83,33 | 146.185.407 |
| Total | | 34.309.271.378 | 26.630.629.327 | 77,62 | 84,83 | 7.678.642.051 |

Tabel 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=10/4 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | 0 | |
| 2 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | |
| 2 9 3 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | |
| 2 9 3 2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Persentase penyediaan dan pengelolaan pangan pokok | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--|--|
| 2 | 9 | 3 | 2.01 | 4 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 3 | 2.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/kota | 100% | 100% | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| 2 | 9 | 3 | 2.02 | 3 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 3 | 2.04 | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | data Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun target konsumsi pangan Per kapita | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | Target konsumsi pangan Per kapita | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | | | |
| 2 | 9 | 3 | 2.04 | 2 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | | | | | | |
| 2 | 9 | 4 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 4 | 2.02 | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 9 | 4 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | | | |
| 2 | 9 | 5 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 5 | 2.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 9 | 5 | 2.01 | 5 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pelayanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi | 100% |
| 3 | 25 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 25 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | persentase pelayanan keuangan dinas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 25 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 50 Orang/Bulan | 57 Orang/Bulan | 100% | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | persentase pelayanan administrasi BMD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 25 | 1 | 2.03 | 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.03 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persentase pelayanan kepegawaian dinas | 100% | 100% | | | | | 100% | 100% |
| 3 | 25 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase pelayanan administrasi umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket | 1 Paket | 100% | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | 1 Paket | 1 Paket | 100% | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket | 1 Paket | 100% | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | 4 Paket | 4 Paket | 100% | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 7 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | persentase tersedianya BMD | 100% |
| 3 | 25 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | 2 Unit | 0 | 0% | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | 3 Unit | 2 | 66,67% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 25 | 1 | 2.07 | 9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | 2 Unit | 2 Unit | 100% | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemda | 100% |
| 3 | 25 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persentase pemeliharaan BMD | 100% |
| 3 | 25 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | 18 Unit | 11 Unit | 61% | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | 10 Unit | 19 Unit | 100% | | | | | | |
| 3 | 25 | 3 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi | 16 KUB | | 16 KUB | 45 KUB | 100% | 16 KUB | 16 KUB | 100% |
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | 1 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | | | 75 Orang | 75 Orang | 100% | | | |
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | | | 45 Kelompok | 45 Kelompok | 100% | | | |
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 3 | 2.03 | | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah peserta lelang yang terdaftar | 20 Orang | | | | | 20 Orang | | |
| 3 | 25 | 3 | 2.03 | 1 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 3 | 2.03 | 2 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah POKDAKAN yang dibina | 20 Kelompok | | 20 Kelompok | 23 Kelompok | | 20 Kelompok | 20 Kelompok | 100% |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | 1 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | | | 10 Kelompok | 23 Kelompok | 100% | | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.03 | | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pembudidaya ikan yang mengurus izin | 200 Orang | | 0 | 0 Rekomendasi | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 3 | 25 | 4 | 2.03 | 2 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 235 Ton | 187,12 | 194 Ton | 225,55 | 100% | 215 Ton | 215 Ton | 100% | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 1 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 2 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1 Unit | 1 Unit | 100% | | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 1 Unit | 3 Unit | 100% | | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 4 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 25 | 6 | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 6 | 2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran | 200 Dokumen | | | | | | | | 120 Dokumen | 120 Dokumen | 100% | | | |
| 3 | 25 | 6 | 2.01 | 1 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 6 | 2.02 | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Poklamsar Terbina | 20 Kelompok | | | | | | | 15 Kelompok | 15 Kelompok | 100% | | | |
| 3 | 25 | 6 | 2.02 | 1 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 6 | 2.03 | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 25 | 6 | 2.03 | 2 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | | | 10 Pelaku Usaha | 10 Pelaku Usaha | 100% | | | | | | | | |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 3 | 27 | 2 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 2 | 2. | 02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | |
| 3 | 27 | 2 | 2. | 02 | 2 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | | | | |
| 3 | 27 | 2 | 2. | 06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Bibit Unggas | 1000 Ekor | | - | - | - | 100 Ekor | 100 Ekor | 100% | |
| | | | | | | Jumlah hijauan pakan ternak | 5 Paket | | 5 Paket | 0 | 0% | | | | |
| 3 | 27 | 2 | 2. | 06 | 1 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | 200 Ekor | 0 | 0% | | | | |
| 3 | 27 | 2 | 2. | 06 | 2 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 3 | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 3 | 2. | 02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian | 1 Paket | | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| 3 | 27 | 3 | 2. | 02 | 9 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | 2 Unit | 2 Unit | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 3 | 27 | 4 | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 4 | 2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penjaminan kesehatan hewan | 1300 Ekor | | 1000 Ekor | 2452 Ekor | 100% | 1200 Ekor | 1200 Ekor | 100% |
| 3 | 27 | 4 | 2.01 | 1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | | | |
| 3 | 27 | 4 | 2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelayanan jasa medik veteriner | 1 Laporan | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| 3 | 27 | 4 | 2.03 | 2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 100% | | | |
| 3 | 27 | 7 | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | | | | |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian | 12 Kelompok | | 12 Kelompok | 49 Kelompok | 100% | 12 Kelompok | 12 Kelompok | 100% |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | 6 Unit | 3 Kelembagaan | 50% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|-------------|------|--|--|--|
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | 6 Unit | 49 Kelompok | 100% | | | |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 3 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | 6 Unit | 6 Unit | 100% | | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisa kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator berdasarkan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas

| NO | INDIKATOR | SPM | IKK | TARGET RENSTRA OPD | | | | | REALISASI CAPAIAN | | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISIS |
|----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|--------|----------|-------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | Nilai Tukar Petani | - | - | 100 | 101 | 101,5 | 102 | 102,5 | 101,38 | 101 | 101,5* | 102 | 102,5 | Angka sementara |
| | Nilai Tukar Nelayan | - | - | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 108 | 108,5 | 109* | 109,5 | 110 | Angka sementara |
| 1 | Persentase cakupan bina kelompok petani | - | - | 6 | 15 | 25 | 35 | 45 | 6 | 32 | 25* | 35 | 45 | Angka sementara |
| 2 | Persentase cakupan bina kelompok nelayan | - | - | 6 | 10 | 25 | 30 | 35 | 39 | 17 | 25* | 30 | 35 | Angka sementara |
| B | Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB | - | - | 27,43 | 27,97 | 28,23 | 28,77 | 29,01 | 27,43 | 27,97 | 27,97* | 28,77 | 29,01 | Angka sementara |
| | Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB | - | - | 71,66 | 71,8 | 71,9 | 72 | 72,1 | 71,66 | 71,8 | 71,8* | 72 | 72,1 | Angka sementara |
| 3 | Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya) | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14,96 | 14,96* | 4 | 5 | Angka sementara |
| 4 | Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan | | | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1 | 1,5 | 2* | 2,5 | 3 | Angka sementara |
| 5 | Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas) | | | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 1,5 | 2 | 2,5* | 3 | 4 | Angka sementara |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| 6 | Persentase peningkatan produksi olahan perikanan | | | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 10 | 12 | 15* | 17 | 20 | Angka sementara |
| 7 | Score Pola Pangan Harapan | | | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 77,2 | 73,4 | 78,7 | 81,5 | 82 | |
| C | Nilai RB Perangkat Daerah | | | CC/56,8 | CC/ 57 | CC/57,2 | CC/57,4 | CC/57,6 | 60,5 | CC/ 57 | NA | CC/57,4 | CC/57,6 | |
| 8 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | | | B/69 | B/69,5 | B/70 | B/70,5 | B/71 | B/64,36 | BB/77,35 | BB/77,41 | B/70,5 | B/71 | |
| 9 | Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah | | | A/94,78 | A/94,79 | A/94,8 | A/94,81 | A/94,82 | A/94,78 | A/95,14 | A/95,08 | A/94,81 | A/94,82 | |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan

Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan, bidang Pertanian dan bidang Pangan.

Urusan Perikanan

- a. Tidak terkendalinya intervensi manusia dalam mengelola sumber daya ikan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kurangnya pembinaan terhadap kelompok perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan (laki-laki dan perempuan).
- b. Kemiskinan dan lemahnya pengawasan terhadap praktik-praktik penangkapan ikan menyebabkan destruksi ekosistem perikanan dalam skala yang relatif lebih besar.
- c. Kurangnya modal serta sulitnya akses untuk masuk ke lembaga keuangan, rendahnya kualitas SDM, terbatasnya akses terhadap informasi sehingga masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak.
- d. Terjadinya siklus nonsimetris (*cycle asymmetry*) dimana pada saat usaha mengalami periode menggembirakan nelayan cenderung menambah kapital (kapal dan alat tangkap) namun kapital tidak mudah ditarik kembali ketika mengalami periode yang kurang menguntungkan.
- e. Sumber daya perikanan yang bersifat *common property* dengan rezim akses terbuka dalam eksploitasinya menimbulkan masalah eksternalitas baik dalam bentuk eksternalitas perebutan daerah tangkap (*space interception externality*) maupun eksternalitas alat tangkap (*gear externality*).
- f. Belum intensifnya budidaya perikanan sebagai kegiatan ekonomi produktif guna menunjang menurunnya produksi dari sektor penangkapan.
- g. Rendahnya mutu hasil perikanan dan kurangnya diversifikasi produk hasil perikanan sehingga menyebabkan rendahnya nilai tambah produk hasil perikanan.

Urusan Pangan

a. Kelancaran distribusi dan akses pangan.

Masalah yang dijumpai adalah :

- (1) infrastruktur distribusi,
- (2) sarana dan prasarana pasca panen,
- (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah,
- (4) sistem informasi pasar,
- (5) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah,
- (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi,
- (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan.

b. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan ini penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan dan terkait dengan cuaca *extreme*.

c. Konsumsi beras masih cukup tinggi yaitu sebesar 88,60 kg/kap/thn;

d. Faktor penyebab belum berkembangannya adalah:

- (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya,
- (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta,
- (3) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal
- (4) rendahnya citra pangan lokal,

e. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan;

Urusan Pertanian

a. Belum semua Sumber Daya Pertanian khususnya sebagian petani mau mengikuti arahan teknologi yang telah disampaikan guna tercapainya peningkatan produksi pertanian;

- b. Dengan adanya alih fungsi lahan khususnya pada lahan pertanian yang produktif menambah beban dalam peningkatan ketersediaan pangan yang cukup khususnya untuk tanaman padi;
- c. Tingkat kesuburan lahan semakin menurun (kandungan Bahan Organik tanah 1-2%) sehingga memerlukan dosis pupuk yang tinggi untuk menghasilkan produksi yang optimal;
- d. Petani belum memiliki kesadaran untuk mengembalikan bahan organik yang hilang karena panen ke lahannya;
- e. Jalan usaha tani/jalan produksi masih kurang sehingga petani memerlukan biaya yang tinggi untuk mengangkut hasil panennya;
- f. Debit air irigasi makin berkurang sehingga banyak petani pada waktu musim tanam padi kekurangan air sehingga menggunakan air pompa untuk mengairi sawahnya;
- g. Kurangnya SDM dalam pelayanan keswan dan kesmavet;
- h. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman peternak dalam manajemen kesehatan hewan;
- i. Kurangnya fasilitas laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dalam menunjang pelayanan;
- j. Masih tingginya potensi penyakit zoonosis (menular dari ternak ke manusia); Belum tersedianya sarana penjualan pangan asal hewan yang sesuai standar hygiene sanitasi;
- k. Masih banyak tempat pemotongan unggas di masyarakat belum memenuhi hygiene sanitasi dan menimbulkan dampak terhadap pencemaran lingkungan;
- l. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)

Selain isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, terdapat isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu

1. Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi anak-anak di suatu kabupaten atau wilayah. Konsep

KLA didasarkan pada prinsip-prinsip hak anak yang diakui secara internasional, termasuk hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak memerlukan komitmen jangka panjang dan kerjasama antara semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak.

2. Kabupaten Kota Sehat (KKS)

Kabupaten Kota Sehat (KKS) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, dengan fokus pada kesehatan dan lingkungan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Kabupaten Kota Sehat merupakan pendekatan holistik yang mengakui bahwa kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Dengan menjalankan Program KKS secara efektif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah.

3. Pencegahan *Stunting*

Pencegahan *stunting* di daerah merupakan upaya yang sangat penting untuk mengatasi masalah gizi buruk pada anak-anak. *Stunting* terjadi ketika anak mengalami pertumbuhan terhambat akibat kekurangan gizi kronis, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak. Pencegahan *stunting* memerlukan komitmen jangka panjang dan kerjasama dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat mengurangi angka *stunting* di daerah dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak.

Guna mewujudkan pencegahan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan merencanakan untuk melaksanakan 1 program, 1 kegiatan, dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dan Sub Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

4. Inovasi Daerah

Inovasi di tingkat daerah adalah proses pengembangan solusi baru atau peningkatan terhadap cara-cara tradisional dalam mengatasi tantangan atau memanfaatkan peluang yang spesifik untuk suatu daerah.

Inovasi di tingkat daerah memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan adanya komitmen bersama untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan, inovasi di tingkat daerah dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Guna meningkatkan inovasi daerah, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan merencanakan untuk melaksanakan 1 program, 1 kegiatan, dan 1 Sub Kegiatan yaitu : Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

5. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah suatu pendekatan atau strategi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan dan mengatasi ketidaksetaraan serta diskriminasi gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan, program, dan praktik-praktik yang ada.

Pengarusutamaan gender merupakan prinsip penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperhatikan dan mengatasi ketidaksetaraan gender, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Guna mewujudkan pembangunan yang responsif gender Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan merencanakan untuk melaksanakan 4 program, 4 Kegiatan, dan 4 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
4. Program Penyuluhan Pertanian, Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan untuk membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses tersebut meliputi perbandingan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif.

Setelah dilakukan proses perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan seperti yang ditunjukkan pada tabel 5, terlihat bahwa terdapat 6 sub kegiatan yang berbeda antara hasil analisis kebutuhan dengan Rancangan Awal RKPD. Hal ini merupakan hasil pembahasan pada Forum OPD yang telah disepakati yaitu, penyesuaian pagu Gaji ASN, kegiatan perlombaan mancing untuk meningkatkan kualitas mutu hasil perikanan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, budidaya rumput laut, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, cadangan pangan Daerah, dan operasional HSRT.. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan | 84 Persen | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan | 84 Persen | | |
| | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | Data Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan | 1 Dokumen | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | Data Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan | 1 Dokumen | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | KKA | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | 74.911.100 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | KKA | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | 74.911.100 | |
| 2 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | | Persentase penanganan kerawanan pangan | 56 Persen | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | | Persentase penanganan kerawanan pangan | 56 Persen | | |
| | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan | 1 Dokumen | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan | 1 Dokumen | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| | | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | KKA | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 22.574.400 | | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | KKA | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 122.574.400 | Mengakomodir cadangan pangan Daerah |
| 3 | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | | Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan yang diterbitkan | 80 Persen | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | | Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan yang diterbitkan | 80 Persen | | |
| | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar | 100 Persen | | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar | 100 Persen | | |
| | | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | KKA | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | 27.514.500 | | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | KKA | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | 27.514.500 | |
| 4 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pelayanan keuangan dinas | 100 Persen | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pelayanan keuangan dinas | 100 Persen | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | KKA | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 Orang/Bulan | 8.315.130.693 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | KKA | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 Orang/Bulan | 8.797.374.493 | Mengakomodir penambahan gaji ASN 8% dan kebutuhan Gaji PPPK 2025 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | KKA | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 18.692.400 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | KKA | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 18.692.400 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | KKA | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 330.330.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | KKA | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 330.330.000 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | KKA | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 20.000.000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | KKA | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 20.000.000 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase tersedianya BMD | 100 Persen | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase tersedianya BMD | 100 Persen | |
| | Pengadaan Mebel | KKA | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | 13.930.701 | Pengadaan Mebel | KKA | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | 13.930.701 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KKA | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 10.063.182 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KKA | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 10.063.182 |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | KKA | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 345.276.095 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | KKA | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 345.276.095 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemda | 100 Persen | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemda | 100 Persen | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KKA | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 118.049.410 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KKA | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 118.049.410 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KKA | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 50.516.445 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KKA | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 50.516.445 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KKA | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 3.889.733.816 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KKA | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 3.889.733.816 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Pemeliharaan BMD | 100 Persen | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Pemeliharaan BMD | 100 Persen | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | KKA | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 13.822.515 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | KKA | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 13.822.515 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KKA | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 15.383.857 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KKA | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 15.383.857 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KKA | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 32.589.429 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KKA | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 32.589.429 |
| 5 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 5 Persen | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 5 Persen | |
| | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi | 16 Kelompok | | Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi | 16 Kelompok | |
| | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | KKA | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 160 Orang | 30.000.000 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | KKA | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 160 Orang | 3.642.734.200 |
| | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | KKA | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 16 Kelompok | 70.000.000 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | KKA | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 16 Kelompok | 70.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | 65 Persen | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | 65 Persen | | |
| | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | | Jumlah POKDAKAN yang dibina | | | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | | Jumlah POKDAKAN yang dibina | 30 Kelompok | | |
| | | | | | | | KKA | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 30 Kelompok | 1.220.000.000 | Penambahan kegiatan guna mengkomodir usulan hasil forum OPD (Budidaya Rumput Laut) |
| | | | | | | | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | |
| | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 235 Ton | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 235 Ton | | |
| | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | KKA | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 44.900.000.000 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | KKA | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 100.000.000 | Mengakomodir Usulan Forum OPD (Operasional HSRT) |
| | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | KKA | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 100.000.000 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | KKA | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 700.000.000 | |
| 7 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | | Persentase Produksi Pengolahan Perikanan | 83,30 Persen | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | | Persentase Produksi Pengolahan Perikanan | 83,30 Persen | | |
| | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran | 200 Dokumen | | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran | 200 Dokumen | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|
| | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | KKA | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | 200 Dokumen | 43.298.800 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | KKA | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | 200 Dokumen | 143.298.800 | Mengakomodir Usulan Forum OPD (Perlombaan mancing) |
| | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan | 100 Persen | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan | 100 Persen | | |
| | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | KKA | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 10 Pelaku Usaha | 56.701.200 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | KKA | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 10 Pelaku Usaha | 176.701.200 | |
| 8 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | Persentase Penyediaan Sarana Pertanian | 80 Persen | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | | Persentase Penyediaan Sarana Pertanian | 80 Persen | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | | |
| | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | KKA | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | 33.000.000 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | KKA | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | 448.995.284 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| 9 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian | 88,20 Persen | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian | 88,20 Persen | | | |
| | Pengembangan Prasarana Pertanian | | Jumlah kawasan yang menghasilkan produk pertanian, peternakan, perkebunan dan biogas untuk memenuhi kebutuhan lokal kecamatan | 1 Unit | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah kawasan yang menghasilkan produk pertanian, peternakan, perkebunan dan biogas untuk memenuhi kebutuhan lokal kecamatan | 1 Unit | | | |
| | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | KKA | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | 1 Dokumen | 51.000.000 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | KKA | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | 1 Dokumen | 201.000.000 | Mengakomodir Usulan Forum OPD (LP2B) |
| | Pembangunan Prasarana Pertanian | | Jumlah Prasarana Pertanian | 1 Unit | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian | 1 Unit | | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | KKA | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 20.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | KKA | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 425.000.000 | |
| 10 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | Persentase Kesehatan Hewan Ternak Dan Kesmavet | 86 Persen | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Kesehatan Hewan Ternak Dan Kesmavet | 86 Persen | | | |
| | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah penjaminan kesehatan hewan | 1300 Ekor | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penjaminan kesehatan hewan | 1300 Ekor | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | KKA | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan | 15.000.000 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | KKA | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan | 15.000.000 |
| | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah pelayanan jasa medik veteriner | 1 Laporan | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah pelayanan jasa medik veteriner | 1 Laporan | |
| | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | KKA | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | 15.000.000 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | KKA | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | 15.000.000 |
| 11 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | Persentase Kinerja Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 75 Persen | | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | Persentase Kinerja Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 75 Persen | |
| | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | Jumlah penanganan kasus penyakit pertanian yang berhasil dikendalikan | 85 Persen | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | Jumlah penanganan kasus penyakit pertanian yang berhasil dikendalikan | 85 Persen | |
| | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | KKA | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 1 Ha | 26.000.000 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | KKA | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 1 Ha | 26.000.000 |
| 12 | Program Penyuluhan Pertanian | | Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok tani | 95 Persen | | Program Penyuluhan Pertanian | | Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok tani | 95 Persen | |
| | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian | 12 Kali | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian | 12 Kali | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--|--|
| | | | KKA | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 12 Kelompok | 15.000.000 | | | KKA | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 12 Kelompok | 15.000.000 | | |
| | | | Jumlah | | | 59.042.659.043 | | | Jumlah | | | 21.448.632.327 | | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat kepada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dapat diperoleh dari *stakeholder* di bidang perikanan, pertanian dan pangan seperti Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (KUB), Kelompok Nelayan Pembudidaya (Pokdakan), Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar), Kelompok Tani (Poktan), dan lain-lain. Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya dan petani, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Diharapkan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan seperti, pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Kota Sehat (KKS), pengarusutamaan gender (PUG), pencegahan stunting, pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGS), konektivitas wilayah, pengendalian inflasi, penerapan *blue economy*, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan inovasi daerah. Usulan-usulan dapat diperoleh melalui musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten, maupun berupa usulan langsung dari masyarakat dengan menggunakan proposal.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau hasil musrenbang kecamatan Tahun 2025 dapat ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Desa Telaga Kecil, Kec Siantan Selatan | Terlaksananya Bantuan | 1 Paket | Bantuan Benih Ikan Kerapu |
| 2 | Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Desa Mengkait, Kec Siantan Selatan | Terlaksananya Bantuan | 20 unit | Bantuan penunjang pengolahan hasil perikanan (Pembeku ikan) |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, maka Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas mengajukan program/kegiatan ke Kementerian terkait sebagai wujud partisipasi dalam mendukung program pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan petani.

Berdasarkan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan angka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan visi Indonesia Emas 2045 : Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Terdapat 8 misi (agenda) pembangunan 2045 yaitu:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Kestinambungan Pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu-isu pokok dan permasalahan mendesak yang termuat dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada semua fungsi dan subfungsi pelayanan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang perlu diagendakan dalam RKPD 2025. Berdasarkan RPJMD 2021 – 2026, visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”. Untuk menunjang pencapaian visi tersebut maka ditetapkan empat misi dan misi yang terkait dengan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan adalah “Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata”.

Adapun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut:

| No | Tujuan | Sasaran |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan | Meningkatnya ekonomi dan sosial kelompok pertanian dan kelompok perikanan |
| 2 | Meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB | Meningkatnya produksi perikanan |
| | | Meningkatnya produksi pertanian |
| | | Meningkatnya produksi olahan perikanan |
| | | Meningkatnya ketahanan pangan |
| 3 | Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien |

Adapun rancangan tema pembangunan dan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2025, adalah sebagai berikut: Rancangan Tema Pembangunan “Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan”.

Rancangan Prioritas Pembangunan :

- 1 Peningkatan pemanfaatan sumberdaya ekonomi unggulan daerah;

- 2 Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
- 3 Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
- 4 Optimalisasi reformasi birokrasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan: Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs, Pengarusutamaan Gender, Transformasi Digital, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir.

Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan berkomitmen dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu:

1. **Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS)**

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), adalah serangkaian target yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia hingga tahun 2030.

Pencapaian TPB/SDGs memerlukan kolaborasi dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu. Dengan memprioritaskan tujuan-tujuan ini dan mengambil tindakan bersama, diharapkan kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua.

2. **Konektivitas Wilayah**

Konektivitas wilayah merujuk pada hubungan fisik, sosial, dan ekonomi antara berbagai bagian atau wilayah dalam suatu negara atau area geografis tertentu. Ini mencakup infrastruktur transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta hubungan sosial dan ekonomi antara komunitas di berbagai wilayah.

Infrastruktur transportasi adalah elemen kunci dalam menciptakan konektivitas wilayah. Ini termasuk jalan raya, kereta api, bandara, pelabuhan, jalur pipa, dan jaringan distribusi energi. Infrastruktur ini memungkinkan mobilitas barang dan orang antara berbagai wilayah, memperlancar perdagangan, pariwisata, dan integrasi ekonomi.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga memainkan peran penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah. Akses yang mudah dan cepat ke internet, telepon seluler, dan layanan komunikasi lainnya memungkinkan pertukaran informasi, kolaborasi bisnis, dan akses ke layanan penting seperti pendidikan jarak jauh dan perawatan kesehatan telemedis.

Selain infrastruktur fisik dan teknologi, konektivitas wilayah juga melibatkan hubungan sosial dan ekonomi antara komunitas di berbagai wilayah. Ini termasuk jaringan bisnis, kerjasama antar pemerintah daerah, pertukaran budaya, dan kolaborasi dalam proyek-proyek pengembangan bersama.

Peningkatan konektivitas wilayah merupakan tujuan penting dalam pembangunan berkelanjutan, membutuhkan investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur fisik, teknologi informasi, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi di tingkat daerah merupakan tantangan yang kompleks karena inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi di tingkat daerah meliputi:

Kebijakan Moneter: Otoritas moneter, seperti bank sentral, dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Ini bisa termasuk menaikkan suku bunga untuk mengurangi pinjaman dan investasi, mengurangi jumlah uang yang beredar, atau menggunakan instrumen kebijakan lainnya.

Kebijakan Fiskal: Pemerintah daerah dapat menggunakan kebijakan fiskal, seperti mengurangi pengeluaran publik atau menaikkan pajak, untuk mengendalikan inflasi. Hal ini bisa mengurangi tekanan permintaan agregat dalam ekonomi.

Pengendalian Harga: Pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan harga-harga barang kebutuhan pokok, misalnya dengan subsidi atau pengaturan harga maksimum.

Pengendalian Pasokan: Mengendalikan pasokan barang-barang tertentu yang menjadi penyebab inflasi dapat membantu mengurangi tekanan inflasi. Misalnya, meningkatkan produksi lokal atau mengimpor barang-barang dari daerah lain.

Pendidikan dan Komunikasi: Meningkatkan literasi ekonomi di tingkat daerah dan mengkomunikasikan informasi tentang inflasi serta dampaknya kepada masyarakat dapat membantu mengubah perilaku konsumen dan produsen.

Kolaborasi Regional: Kerjasama antara pemerintah daerah dalam suatu wilayah dapat membantu mengendalikan inflasi secara bersama-sama dengan mengadopsi kebijakan yang konsisten dan koordinasi dalam pengelolaan ekonomi.

Peningkatan Efisiensi Ekonomi: Meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa serta mengurangi biaya produksi dapat membantu mengendalikan tekanan inflasi.

Setiap strategi ini harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang ada di masing-masing daerah. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga keuangan juga penting untuk mencapai tujuan pengendalian inflasi.

4. Penerapan *Blue Economy*

Penerapan *Blue Economy*, atau ekonomi biru, mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan.

Penerapan *Blue Economy* memerlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, *Blue Economy* dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan laut yang penting.

5. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah memerlukan pendekatan yang berorientasi pada konteks lokal dan memperhatikan kondisi khusus setiap daerah.

Pentingnya pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan tidak dapat disangkal dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak, kemiskinan ekstrem dapat diatasi secara efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Guna penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan merencanakan untuk melaksanakan 2 program yaitu : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam kegiatan dan dirincikan dalam sub kegiatan. Rencana Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 1.1. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - 1.1.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - 2.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - 3.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 4.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4.1.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4.2.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.4.5. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 4.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.4.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 4.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.5.1. Pengadaan Mebel
 - 4.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4.5.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 4.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 4.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 5.1 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 5.1.1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - 5.1.2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- 6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 6.1 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - 6.1.1. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 6.2 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - 6.2.1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.2.2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 7.1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - 7.1.1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
 - 7.2 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 7.2.1. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 8.1 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 8.1.1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
- 9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 9.1 Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 9.1.1. Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota

- 9.2 Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 9.2.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- 10. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 10.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 10.1.1. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 10.2 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 10.2.1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- 11. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - 11.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 11.1.1. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- 12. Program Penyuluhan Pertanian
 - 12.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 12.1.1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Adapun matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 7 yang berisikan rekapitulasi rumusan program dan kegiatan: perumusan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas potensi, kendala, permasalahan dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Program dan kegiatan ini memperhatikan isu strategis terkait urusan/tupoksi, dan evaluasi kinerja renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan dan upaya dalam pengentasan kemiskinan. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas merencanakan suatu Renja Tahun 2025 untuk mendukung keberhasilan visi dan misi yang ada yaitu Belanja Daerah sebesar Rp.21.448.632.327 (*Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

Penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Kute Siantan dan di Kecamatan Siantan Selatan. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | | | | | | 21.448.632.327,00 | | | | | | 21.863.604.764,00 | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 225.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| | 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | 225.000.000,00 | | | | | | | 300.000.000,00 | |
| 1. | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | <i>Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan</i> | - | | | 84 % | 74.911.100,00 | | | | | | - | 100.000.000,00 | |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | <i>Data Target Konsumsi Pangan Perkapita Per tahun</i> | - | | | 1 Dokumen | 74.911.100,00 | | | - | Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah Peningkata n pemanfaa tan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | - | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i> | | | | 1 Laporan | 74.911.100,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah Peningkata n pemanfaa tan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| 2. | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | <i>Persentase penanganan kerawanan pangan</i> | - | | | 56 % | 122.574.400,00 | | | | | | - | 150.000.000,00 | |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan</i> | - | | | 1 Dokumen | 122.574.400,00 | | | - | Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah Peningkata n pemanfaa tan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | - | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 1 Dokumen | 122.574.400,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| 3. | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | <i>Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan yang diterbitkan</i> | - | | | 80 % | 27.514.500,00 | | | | | | - | 50.000.000,00 | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar</i> | - | | | 100 % | 27.514.500,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | - | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i> | | | | 1 Dokumen | 27.514.500,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 21.223.632.327,00 | | | | | | | 21.563.604.764,00 | |
| | 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 20.077.637.043,00 | | | | | | | 20.027.854.764,00 | |
| 1. | 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | - | | | 100 % | 14.024.902.843,00 | | | | | | - | 14.337.854.764,00 | |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase pelayanan keuangan dinas</i> | - | | | 100 % | 8.993.694.493,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | ASN Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | - | 9.006.136.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 57 Orang/bulan | 8.797.374.493,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | ASN Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 8.800.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 196.320.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | ASN Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 206.136.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase pelayanan Administrasi BMD</i> | - | | | 100 % | 43.800.000,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | - | 45.990.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | | | | 1 Laporan | 43.800.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 45.990.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase pelayanan kepegawaian</i> | - | | | 100 % | 1.000.000,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | - | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 1 Orang | 1.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 50.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase pelayanan administrasi umum</i> | - | | | 100 % | 497.042.900,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | - | 521.895.045,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 6.479.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 6.802.950,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 28.093.100,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 29.497.755,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 2 Paket | 43.448.400,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 45.620.820,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 50.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 52.500.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i> | | | | 1 Laporan | 18.692.400,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 19.627.020,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 1 Laporan | 330.330.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 346.846.500,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 21.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase tersedianya BMD</i> | - | | | 100 % | 369.269.978,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | - | 387.733.476,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | | | | 2 Unit | 13.930.701,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 14.627.236,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 1 Unit | 10.063.182,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 10.566.341,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 2 Unit | 345.276.095,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 362.539.899,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemda</i> | - | | | 100 % | 4.058.299.671,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | - | 4.261.214.654,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | | | | 12 Laporan | 118.049.410,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 123.951.880,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 1 Laporan | 50.516.445,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 53.042.267,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Laporan | 3.889.733.816,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 4.084.220.507,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase Pemeliharaan BMD</i> | - | | | 100 % | 61.795.801,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | - | 64.885.589,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 10 Unit | 13.822.515,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 14.513.640,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 10 Unit | 15.383.857,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 16.153.049,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 30 Unit | 32.589.429,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | | 34.218.900,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | <i>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</i> | - | | | 5 % | 3.712.734.200,00 | | | | | | - | 3.210.000.000,00 | |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi</i> | - | | | 16 Kelompok | 3.712.734.200,00 | | | - | Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas | - | 3.210.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i> | | | | 160 Orang | 3.642.734.200,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas | | 3.000.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya</i> | | | | 16 Kelompok | 70.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Jemaja Timur, Genting Pulur | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas | | 210.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| 3. | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | <i>Persentase Produksi Perikanan Budidaya</i> | - | | | 65 % | 2.020.000.000,00 | | | | | | - | 2.150.000.000,00 | |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | <i>Jumlah POKDAKAN yang dibina</i> | - | | | 30 Kelompok | 1.220.000.000,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Pembudidaya Ikan | - | 1.250.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan</i> | | | | 30 Kelompok | 1.220.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Pembudidaya Ikan | | 1.250.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | - | | | 235 Ton | 800.000.000,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Pembudidaya Ikan Kabupaten Kepulauan Anambas | - | 900.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Pembudidaya Ikan Kabupaten Kepulauan Anambas | | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Unit | 700.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Pembudidaya Ikan Kabupaten Kepulauan Anambas | | 750.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| 4. | 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Produksi Pengolahan Perikanan | - | | | 83.30 % | 320.000.000,00 | | | | | | - | 330.000.000,00 | |
| | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran | - | | | 200 Dokumen | 143.298.800,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Pelaku Usaha Perikanan, Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | - | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.06.2.01.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko</i> | | | | 200 Dokumen | 143.298.800,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Pelaku Usaha Perikanan, Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | <i>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan</i> | - | | | 100 % | 176.701.200,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Pelaku Usaha Perikanan, Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | - | 180.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi</i> | | | | 10 Pelaku Usaha | 176.701.200,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Pelaku Usaha Perikanan, Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | | 180.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | 1.145.995.284,00 | | | | | | | 1.535.750.000,00 | |
| 1. | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | <i>Persentase Penyediaan Sarana Pertanian</i> | - | | | 80 % | 448.995.284,00 | | | | | | - | 450.000.000,00 | |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | - | | | 3 Dokumen | 448.995.284,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Petani, Pekebun, Peternak | - | 450.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i> | | | | 1 Dokumen | 448.995.284,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Petani, Pekebun, Peternak | | 450.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| 2. | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | <i>Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian</i> | - | | | 88.20 % | 626.000.000,00 | | | | | | - | 640.000.000,00 | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | <i>Jumlah kawasan yang menghasilkan produk pertanian, peternakan, perkebunan dan biogas untuk memenuhi kebutuhan lokal kecamatan</i> | - | | | 1 Unit | 201.000.000,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | - | 210.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B</i> | | | | 1 Dokumen | 201.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | | 210.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | <i>Jumlah Prasarana Pertanian</i> | - | | | 1 Unit | 425.000.000,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Petani, Pekebun, Peternak | - | 430.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i> | | | | 1 Unit | 425.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Petani, Pekebun, Peternak | | 430.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| 3. | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | <i>Persentase Kesehatan Hewan Ternak Dan Kesmavet</i> | - | | | 86 % | 30.000.000,00 | | | | | | - | 400.000.000,00 | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah penjaminan kesehatan hewan</i> | - | | | 1300 Ekor | 15.000.000,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Peternak, pengguna jasa medik veteriner | - | 300.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota</i> | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Peternak, pengguna jasa medik veteriner | | 300.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah pelayanan jasa medik veteriner</i> | - | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Peternak, pengguna jasa medik veteriner | - | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner</i> | | | | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Peternak, pengguna jasa medik veteriner | | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| 4. | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | <i>Persentase Kinerja Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i> | - | | | 75 % | 26.000.000,00 | | | | | | - | 30.000.000,00 | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | <i>Jumlah penanganan kasus penyakit pertanian yang berhasil dikendalikan</i> | - | | | 85 % | 26.000.000,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | - | 30.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i> | | | | 1 Ha | 26.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas | | 30.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| 5. | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | <i>Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tani</i> | - | | | 95 % | 15.000.000,00 | | | | | | - | 15.750.000,00 | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | <i>Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i> | - | | | 12 Kali | 15.000.000,00 | | | - | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Kelompok Tani | - | 15.750.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i> | | | | 12 Unit | 15.000.000,00 | Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Optimalisas i Potensi P erekonomia n Daerah Peningkata n pemanfaa tan sumber daya ekonomi unggulan daerah | Kelompok Tani | | 15.750.000,00 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| J U M L A H | | | | | | | | 21.448.632.327,00 | | | | | | | 21.863.604.764,00 | |

BAB V
PENUTUP

Renja merupakan suatu dokumen perencanaan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan ini merupakan hasil kerja dari semua pihak dan dari berbagai sektor serta tentunya dukungan dari masyarakat serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan harapan adanya peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petani dan masyarakat umumnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Semoga dokumen Renja ini dapat menjadi suatu pedoman dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2025.



Tarempa, 22 Juli 2024

Kepala Dinas Perikanan Pertanian Dan Pangan,

Rovaniyadi, S.P

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19710726 200212 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN**

Jl. Imam Bonjol Email : dppp@anambaskab.go.id
T A R E M P A 29791

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 16 /DPPP/02.2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21-667 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21-668 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025;**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebagaimana Diktum Pertama adalah:
1. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan capaian Renstra;
 2. Menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dampak terhadap pencapaian Misi Visi

- Kepala Daerah selanjutnya tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
4. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh hasil musrenbang tahun 2024;
 5. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2025;

KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan;

KELIMA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 05 Februari 2024
Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan,



Rovaniyadi, SP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710726 200212 1 005

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa; dan
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan, Pertanian,
dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 16 /DPPP/02.2024
Tanggal : 05 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ROVANIYADI, SP | Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | Penanggung Jawab |
| 2 | ARCAN ISKANDAR, S.Pi | Sekretaris Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan | Ketua |
| 3 | IKA DEWI PRASASTI LATIFAH, S.Pi | Perencana Ahli Muda Sub Bagian Program | Sekretaris |
| 4 | FETRI ARDIANSYAH, S.St.Pi | Kepala Bidang Perikanan Tangkap | Anggota |
| 5 | NOVIZAL, SST | Kepala Bidang Pertanian | Anggota |
| 6 | NUR ALAM, S.Kel | Kepala Bidang Perikanan Budidaya | Anggota |
| 7 | MERZAWATI, S.Pi | Kepala Bidang Ketahanan Pangan | Anggota |
| 8 | M.KASIM, S.Pi | Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Anggota |
| 9 | HIDAYATI, S.IP | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Anggota |

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 05 Februari 2024
Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan,



Rovaniyadi, SP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710726 200212 1 005